BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.400, 2023 KEMENHUB. Otk. Kantor Kesyahbandaran. Otoritas Pelabuhan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2O12 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/282/M.KT.01/2023 Tanggal 27 Februari 2023 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

www.peraturan.go.id

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 942);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 692) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan:

a. Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
b. Nomor PM 76 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
c. Nomor PM 71 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 942);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Pasal 30 dihapus.

www.peraturan.go.id

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

a. Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;
b. Wilayah kerja merupakan organisasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang membawahinya;
c. Wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
d. Pembentukan atau perubahan wilayah kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.
e. Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

4. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Jumlah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) lokasi, terdiri atas:
    a. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sebanyak 13 (tiga belas) lokasi;
    b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) lokasi;
    c. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III sebanyak 17 (tujuh belas) lokasi;
    d. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lokasi.
(2) Nama kantor, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

5. Pasal 45A dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 dihapus.

6. Pasal 45A dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 dihapus.

7. Pasal 45B dihapus.

8. Di antara Pasal 45B dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45C

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

9. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012, Lampiran I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018, dan Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN

A. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I

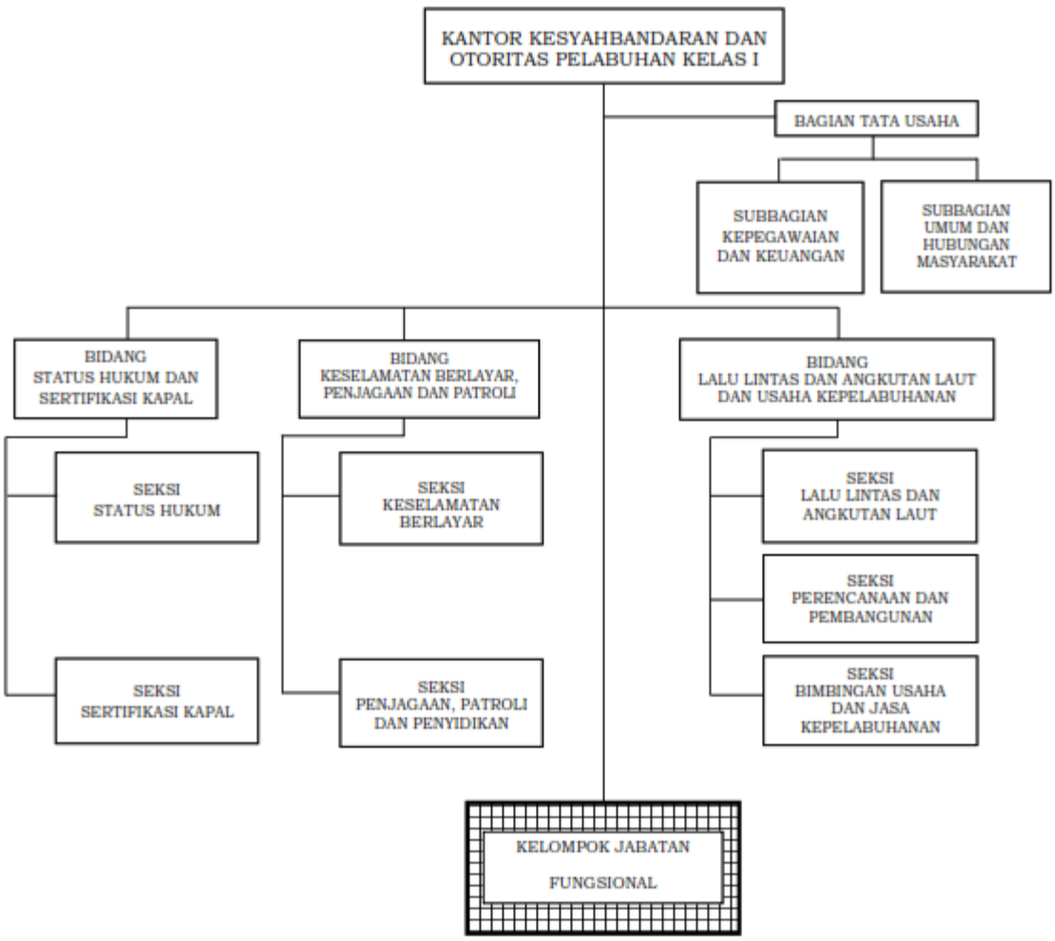

www.peraturan.go.id

B. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II

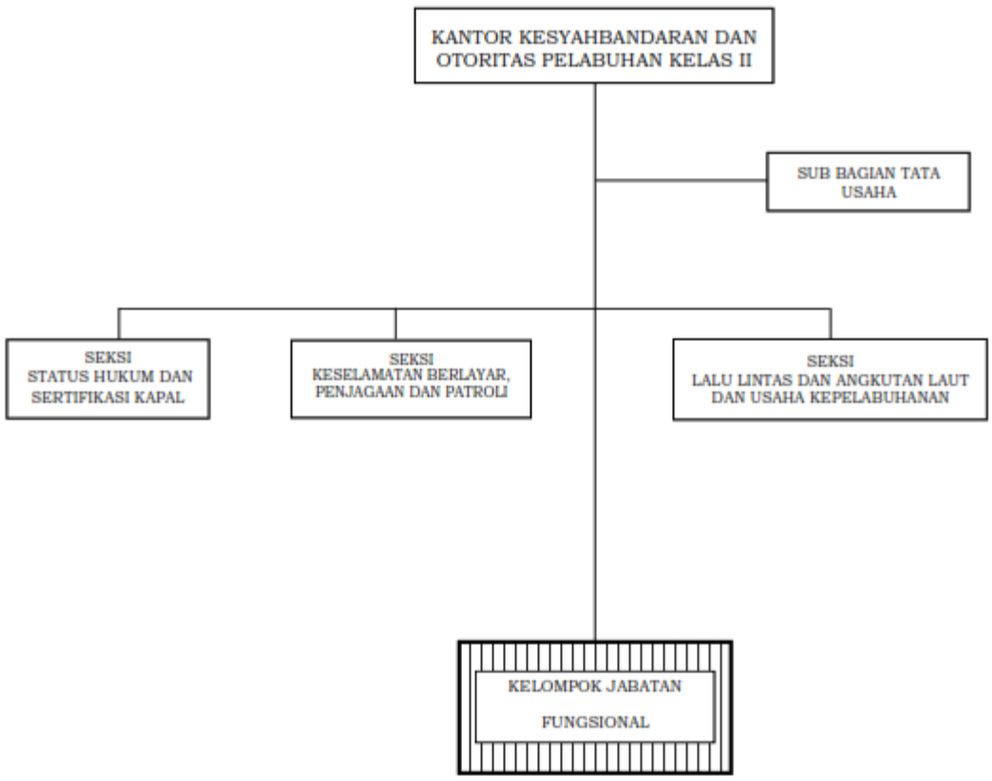

www.peraturan.go.id

C. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III

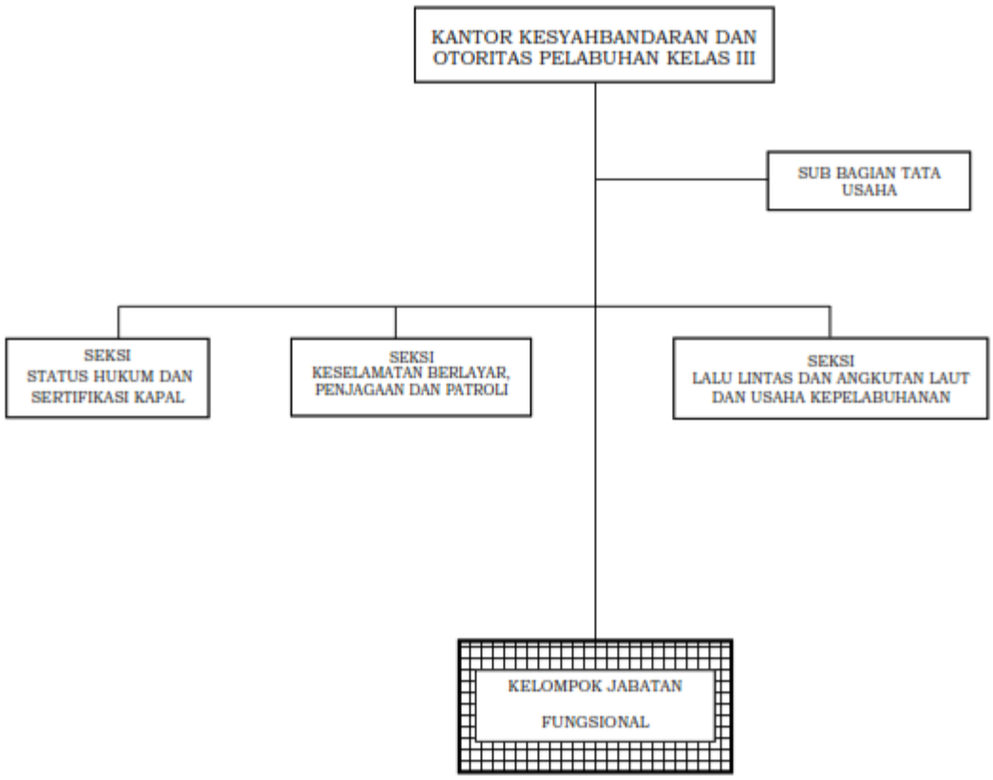

www.peraturan.go.id

D. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV

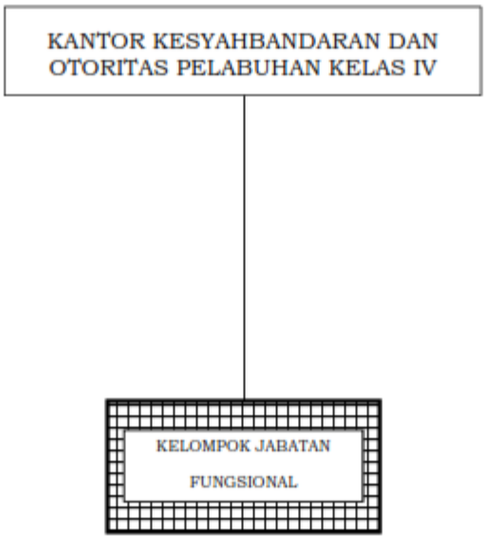

www.peraturan.go.id

E. DAFTAR NAMA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai	Dumai, Riau	1) Lubuk Gaung 2) Pelintung 3) Batu Panjang 4) Darul Anam 5) Tanjung Kapal 6) Gunap 7) Selat Morong
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang	Palembang, Sumatera Selatan	1) Tanjung Api-Api 2) Prambatan 3) Sungai Lilin 4) Karang Agung 5) Gandus 6) Jakabaring 7) Musi Rawas
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang	Panjang, Lampung	1) Sebalang 2) Rangai 3) Teluk Betung 4) Ketapang Padang Cermin 5) Legundi
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun	Karimun, Kepulauan Riau	1) Pasir Panjang 2) Pulau Buru 3) Pulau Sambu 4) Tanjung Batu Kundur 5) Pulau Bulan 6) Pulau Jangkat 7) Pulau Nipah 8) Moro 9) Penyalai 10) Sekumbang 11) Tanjung Berlian 12) Pulau Durai
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas	Semarang, Jawa Tengah	Kendal
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten	Banten, Banten	Terate
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Pontianak	Pontianak, Kalimantan Barat	1) Mempawah 2) Sungai Kakap 3) Teluk Pakedai 4) Kubu
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Sungai Putting

www.peraturan.go.id

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan	Semayang, Kalimantan Timur	Mentawir
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	1) Mahakam Hulu 2) Sanga-sanga 3) Muara Berau
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung	Bitung, Sulawesi Utara	Kema
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon	Ambon, Maluku	-
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong	Sorong, Papua Barat	1) Kalobo 2) Makbon 3) Mega 4) Tanjung Kasuari 5) Saoka 6) Kawasan Arar 7) Seget 8) Sele 9) Salawati 10) Sausapor

2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur	Padang, Sumatera Barat	1) Air Bangis 2) Tiku 3) Sasak 4) Pariaman 5) Carocok Terusan 6) Carocok Painan 7) Panasahan Painan 8) Bungus 9) Muara Padang
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	1) Siak Sri Indrapura 2) Buatan
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Buton	Bengkalis, Riau	1) Bukit Batu 2) Lubuk Muda 3) Sungai Pakning 4) Sungai Apit 5) Bandul
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang	Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	1) Dompak 2) Pangkil 3) Tanjung Mocoh
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Marunda	Jakarta Utara, DKI Jakarta	1) Tarumajaya 2) Tarumanegara 3) Marunda Centre 4) Muara Tawar
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon	Cirebon, Jawa Barat	1) Kejawanan 2) Bondet 3) Astanajapura

www.peraturan.go.id

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			4) Gebang Mekar
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban	Subang, Jawa Barat	1) Blanakan 2) Mayangan 3) Muara Ciasem 4) Ciparage 5) Sungai Buntu 6) Muara Bendera 7) Muara Gembong
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap	Cilacap, Jawa Tengah	Bunton
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik	Gresik, Jawa Timur	Ujung Pangkah
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa	Denpasar, Bali	1) Serangan 2) Tanjung Benoa 3) Kedonganan 4) Sanur
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kotabaru-Batulicin	Kotabaru, Kalimantan Selatan	1) Sebuku 2) Tanjung Batu 3) Gunung Batu Besar 4) Sungai Dua 5) Setangga 6) Serongga 7) Matasiri 8) Marabatuan
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang	Bontang, Kalimantan Timur	-
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tarakan	Tarakan, Kalimantan Utara	1) Malinau 2) Bangkudulis 3) Bebatu 4) Sesayap
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu	Palu, Sulawesi Tengah	1) Wani 2) Donggala 3) Labuan 4) Dalaka 5) Toaya 6) Masaingi 7) Tibo 8) Batusuya 9) Alindau 10) Tompe 11) Sibayu 12) Loli Oge 13) Surumana
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari	Kendari, Sulawesi Tenggara	1) Soropia 2) Tinanggea 3) Sawa 4) Wawatu
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Baubau	Baubau, Sulawesi Tenggara	1) Banabungi Pasarwajo 2) Talaga Raya

www.peraturan.go.id

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			3) Sikeli 4) Lasalimu 5) Batu Atas 6) Liana Banggai 7) Lawele 8) Kadatua 9) Siompu 10) Wamengkoli
17.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate	Ternate, Maluku Utara	1) Sulamadah 2) Hiri 3) Tifure 4) Mayau 5) Moti
18.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura	Jayapura, Papua	1) Demta 2) Depapre 3) Muara Tami 4) Holtekam

3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kuala Tanjung	Batubara, Sumatera Utara	1) Medang Deras 2) Pangkalan Dodek 3) Desa Lalang 4) Tanjung Tiram
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Talang Duku	Muaro Jambi, Jambi	-
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai	Bengkulu, Bengkulu	1) Ketahum 2) Muko-Muko 3) Pulau Tikus
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kijang	Bintan, Kepulauan Riau	1) Kawal 2) Numbing
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa	Jakarta Utara, DKI Jakarta	1) Pantai Mutiara 2) Muara Baru
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Wangi	Banyuwangi, Jawa Timur	1) Pulau Tabuhan 2) Ketapang 3) Muncar 4) Blimbing Sari 5) Pancer 6) Grajagan 7) Boom 8) Puger
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tanjung Pakis	Lamongan, Jawa Timur	1) Brondong 2) Tanjung Awar-Awar 3) Jenu 4) Karang Agung 5) Paciran 6) Pacitan

www.peraturan.go.id

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar	Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	1) Jeranjang 2) Teluk Sepi 3) Labuhan Poh-Sekotong 4) Teluk Awang
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo	Manggarai Barat, Nusa Tenggara Barat	1) Komodo 2) Rinca 3) Bari 4) Nangalili
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	1) Pelabuhan Tenau 2) Nunbaun Sabu 3) Kolbano 4) Semau 5) Sulamu 6) Boking
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit	Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah	1) Kuala Kuayan 2) Parenggean 3) Samuda 4) Pegatan Mendawai 5) Sungai Sebangau
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Rangga Ilung	Barito Selatan, Kalimantan Tengah	1) Kelanis 2) Buntok
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Satui	Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	1) Sei Cuka 2) Angsana 3) Sabamban 4) Sungai Loban 5) Setarap
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado	Manado, Sulawesi Utara	1) Tumumpa 2) Tanah Wangko
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pare-Pare	Pare-Pare, Sulawesi Selatan	Marabombang
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Gorontalo	Gorontalo, Gorontalo	Kabila Bone
17.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Biak	Biak Numfor, Papua	1) Bosnik 2) Wardo

4. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sabang	Sabang, Aceh	Balohan
2.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Langsa	Langsa, Aceh	1) Idi 2) Kuala Beukah
3.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh	Aceh Barat, Aceh	Kuala Bubon

www.peraturan.go.id

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
4.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhoksumawe	Aceh Utara, Aceh	-
5.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Malahayati	Banda Aceh, Aceh	1) Pulo Aceh 2) Lhoknga 3) Sigli
6.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Susu	Langkat, Sumatera Utara	1) Pangkalan Brandan 2) Tanjung Pura 3) Kuala Serapuh 4) Tapak Kuda/ Jaringan Halus 5) Pulau Kampai 6) Pulau Sembilan
7.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sibolga	Sibolga, Sumatera Utara	-
8.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Balai Asahan	Asahan, Sumatera Utara	Bagan Asahan
9.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gunung Sitoli	Gunung Sitoli, Sumatera Utara	-
10.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Cinaku	Indragiri Hulu, Riau	-
11.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Enok	Indragiri Hilir, Riau	Muaro Bakong
12.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan	Indragiri Hilir, Riau	-
13.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagan Siapi-api	Rokan Hilir, Riau	1) Sinaboi 2) Pulau Halang
14.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bengkalis	Bengkalis, Riau	1) Teluk Pambang 2) Bantan Tengah
15.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selat Panjang	Kepulauan Meranti, Riau	1) Tanjung Samak 2) Tanjung Kedabu 3) Teluk Belitung
16.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kuala Tungkal	Tanjung Jabung Barat, Jambi	Kuala Betara
17.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Sabak	Tanjung Jabung Timur, Jambi	-
18.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bakauheni	Lampung Selatan, Lampung	1) Kalianda 2) Ketapang 3) Muara Piluk 4) Kampung Sumur

www.peraturan.go.id

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
19.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam	Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung	1) Belinyu 2) Sungai Liat 3) Sei Selan
20.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjung Pandan	Belitung, Kepulauan Bangka Belitung	1) Tanjung Batu 2) Tanjung Roe
21.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok	Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung	Tanjung Ular
22.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu, DKI Jakarta	1) Untung Jawa 2) Pulau Lancang 3) Pulau Tidung 4) Pulau Pramuka 5) Pulau Kelapa
23.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muara Angke	Jakarta Utara, DKI Jakarta	Muara Kamal
24.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal	Tegal, Jawa Tengah	1) Jongor Tegalsari 2) Larangan 3) Pekalongan 4) Wiradesa 5) Pemalang 6) Brebes 7) Losari
25.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalianget	Sumenep, Jawa Timur	1) Pasongsongan 2) Ambunten 3) Pragaan 4) Giligenting 5) Tanjung Saronggi 6) Pagerbatu 7) Dungkek 8) Bintaro
26.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Panarukan	Situbondo, Jawa Timur	1) Pasir Putih 2) Besuki 3) Kalbut 4) Jangkar 5) Meimbo
27.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo	Probolinggo, Jawa Timur	1) Kalibuntu 2) Paiton 3) Pasuruan 4) Lekok 5) Sendang Biru 6) Prigi 7) Grati
28.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Padangbai	Karangasem, Bali	1) Manggis 2) Amed 3) Kubu 4) Tanah Ampo
29.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Celukan Bawang	Buleleng, Bali	1) Pegametan 2) Brombong 3) Buleleng 4) Pemaron

www.peraturan.go.id

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
			5) Lovina 6) Sangsit
30.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Badas	Sumbawa, Nusa Tenggara Barat	1) Pulau Moyo 2) Teluk Santong 3) Pelabuhan Jambu 4) Prenang
31.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima	Bima, Nusa Tenggara Barat	-
32.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Laurentius Say	Sikka Maumere, Nusa Tenggara Timur	1) Wuring 2) Pemana 3) Sukun 4) Palue 5) Kawapante
33.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ende	Ende, Nusa Tenggara Timur	1) Pulau Ende 2) Maurole 3) Ropa
34.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi	Alor, Nusa Tenggara Timur	1) Maritaing 2) Moru 3) Alor Kecil
35.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Waingapu	Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur	1) Baing 2) Pulau Salura 3) Katundu 4) Melolong
36.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sintete	Sambas, Kalimantan Barat	1) Tambelan 2) Sambas 3) Singkawang 4) Pemangkat 5) Sungai Duri
37.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Ketapang	Ketapang, Kalimantan Barat	1) Satong 2) Pesaguan 3) Pasar Sentap
38.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkalan Bun	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	-
39.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pulang Pisau	Pulang Pisau, Kalimantan Tengah	1) Batanjung 2) Bukit Pinang
40.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Sukamara	Sukamara, Kalimantan Tengah	1) Kuala Jelai 2) Jambi 3) Balai Riang
41.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kumai	Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	-
42.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Nunukan	Nunukan, Kalimantan Timur	1) Sebuku 2) Sebakis 3) Semenggaris
43.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Toli-Toli	Toli-Toli, Sulawesi Tengah	Laulalang

www.peraturan.go.id

NO	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
44.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Garongkong	Barru, Sulawesi Selatan	1) Pancana 2) Labuange 3) Bawa Salo 4) Awerange
45.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Anggrek	Gorontalo Utara, Gorontalo	1) Tolinggula 2) Monano 3) Sumalata 4) Bolontio 5) Biao
46.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Banda Naira	Maluku Tengah, Maluku	Kumber
47.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Merauke	Merauke, Papua	1) Kumbe 2) Bian 3) Wanam 4) Erambu 5) Semangga 6) Tanah Miring
48.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Manokwari	Manokwari, Papua Barat	1) Maruni 2) Sowi Marmpa 3) Saukorem 4) Kaironi
49.	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Fak-Fak	Fak-Fak, Papua Barat	1) Karas 2) Weri

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

www.peraturan.go.id